



SIBAKUL MALIOBORO MENARI 2023 PECAHKAN REKOR MURI

## Gairahkan UMKM Melalui Keistimewaan DIY



KR-Risbika N Putri

Penyerahan Rekor MURI kepada Panitia SiBakul Menari 2023.

**YOGYA (KR)** - Kawasan Malioboro terasa semarak dari halaman Teras Malioboro 1 hingga di sebagian Jalan Malioboro, Sabtu (2/9). Suasana geyub dan penuh sukacita terasa kental dalam event SiBakul Malioboro Menari 2023. Kehadiran 1.800 penari line dance dari Yogya dan berbagai penjur Indonesia sukses meraih Rekor MURI 1.000 Penari Line Dance Berbusana Tradisional dengan Syal Motif Batik Terbangun di Malioboro. Ribuan penggiat line dance dari Universal Line Dance (ULD) Indonesia mengenakan

pakaian tradisional dengan warna-warni indah dilengkapi aksesoris menarik seperti kalung dan topi. Juga mengenakan syal, produk UMKM di DIY. "Event ini bertujuan mempromosikan platform SiBakul, yaitu program pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diinisiasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY. Juga memperingati 11 Tahun Keistimewaan DIY," tutur Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Ir Sri Nurkyatsiwi MMA. Tidak sekadar mengumpulkan para pegiat line dance,

lanjut Siwi sapaan akrabnya, tapi juga menumbuhkan ketahanan ekonomi para pelaku UMKM, "Khususnya para pelaku UMKM di Teras Malioboro 1 dan pelaku ekonomi di sepanjang Sumbu Filosofi anggota SiBakul," jelasnya. Membawa tema Ragam Indonesia Mendukung Jogja Menuju Warisan Dunia ini juga dirangkaikan dengan Festival Belanja Produk UMKM, dimana ribuan peserta line dance yang banyak datang dari luar Yogya juga diminta untuk berbelanja di Teras Malioboro 1. "Peserta mendapatkan voucher

yang dapat digunakan di Teras Malioboro 1," ungkap Siwi. Difasilitasi Dana Keistimewaan (Danais) 2023, acara yang disambut antusias masyarakat ini dibuka Sekda DIY Drs Beny Suharsono MSI dan Ketua Dekranasda DIY GKR Hemas. Dihadiri Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSI, Direktur PT Kirana Adhirajasa Indonesia selaku Ketua Tim Pelaksana GKBRAYA Paku Alam, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari SE, Plt Walikota Yogya Singih Raharjo dan jajaran Forkopimda serta pejabat terkait.

"Terima kasih kehadiran para peserta memeriahkan Festival UMKM Kota Yogya dalam event SiBakul Malioboro Menari 2023 sebagai bagian dari upaya memasarkan produk UMKM dalam peningkatan ekonomi. Semoga semua sukses sehat dan gembira," ucap GKR Hemas dalam sambutannya. Beny Suharsono MSI menyatakan, Festival Entrepreneur (UMKM) Malioboro Menari, menunjukkan dekatnya hubungan UMKM dan tari, yaitu kreativitas. Kreativitas, perkembangan dan pemasaran produk merupakan kunci sukses UMKM. Festival UMKM Malioboro Menari adalah upaya sekali dayung, dua-tiga pulau terlampaui. "Merupakan momen langka,

dimana ekonomi bisnis dan seni atau olahraga secara formal berada di panggung yang sama untuk berpijak sama tinggi, saling sokong didasari semangat kreativitas demi mencapai kebaikan kita semua. Tidak dimaksudkan untuk berhenti di tataran output melainkan juga hingga tataran outcome," ucap Beny. Pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana yang hadir secara virtual mengapresiasi dan mengukuhkan Rekor MURI dalam event SiBakul Malioboro Menari 2023 yang dihelat Diskop UKM DIY. "Line Dance Mengenal Pakaian Tradisional Nusantara dan Syal Batik menjadi rekor dunia

yang meraih Piagam MURI. Line dance hadir di Indonesia sejak 2008 bukan olahraga biasa tapi sarat seni tari dan musik," ujarnya.

Kegiatan yang juga dalam rangka mendukung Yogya Menuju Warisan Dunia yang akan disidangkan di UNESCO 7 September 2023 di Riyadh, Arab Saudi itu menampilkan pula talent dari Yogya, Tami Aulia yang membawakan beberapa lagu. Serta ditutup pengumuman Pemenang 1-6 Line Dance yang dilombakan oleh Sofyan Anas dari ULD Indonesia. "Juara 1 Jawa Timur disusul Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah," ucap Anas. (Feb/Vin)-f



KR-Risbika N Putri

Peserta SiBakul Menari 2023 unjuk kebolehan.

## POLITISI MUDA PDI PERJUANGAN EKO SUWANTO: 11 Tahun UUK DIY, Pemda Harus Ingat Sejarah dan Berjuang Wujudkan Harapan Rakyat

"Perjuangan untuk Undang-Undang Keistimewaan DIY ini luar biasa, maka kita harus menyadari satu hal, yakni UUK DIY tak datang gratis dari langit.

UUK DIY ini buah karma baik sejarah sekaligus buah perjuangan rakyat.

Pelaksanaan UUK DIY ini tak boleh lupa sejarah dan rakyat yang memperjuangkannya."

EKO SUWANTO



FORUM DPRD DIY

SUDAH 11 tahun lalu, Undang-undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah disahkan oleh DPR RI. Kelahiran UU ini tidak hanya memastikan kewenangan istimewa yang dimiliki DIY, juga memastikan tanggungjawab negara terhadap kewenangan yang diberikan tersebut.

Hadirnya Undang-Undang No 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY, selain sebagai anugerah dari Tuhan YME, juga hasil dari perjuangan rakyat. Di mana waktu itu, rakyat terus menerus menyampaikan aspirasi secara bergelombang pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya meminta pemerintah agar mewujudkan undang-undang tentang Keistimewaan DIY.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Eko Suwanto juga melihat peran Yogyakarta sangat luar biasa untuk Indonesia. Catatan penting itu di antaranya, Sultan Hamengku Buwono (HB) IX yang telah menyampaikan maklumat 5 September 1945, menyatakan bergabung Kasultanan Ngayogyakarta dengan Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Demikian pula KGPAA Paku Alam VIII yang juta menyampaikan maklumat di tanggal sama dan bergabung dengan Republik Indonesia. Presiden Soekarno kemudian memberikan penghargaan dan pengakuan melalui UU No 3 tahun 1950 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Namun UU tersebut belumlah menjabarkan secara lengkap kewenangan keistimewaan DIY, hingga akhirnya setelah gelombang desakan rakyat, lahir UU No 13/2012. UU tersebut memastikan 5 kewenangan istimewa yang dimiliki DIY, yakni 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. kebudayaan; dan 4. pertahanan; dan 5. tata ruang.

Menurut Eko Suwanto saat memperjuangkan status keistimewaan DIY ini, tuntutan rakyat itu, tidak hanya berlandaskan faktor sejarah asal usul, tetapi karena rakyat ingin lebih sejahtera. Maka dari itu Pemda DIY, setelah lahirnya UU No 13/2012 ini punya kewajiban menyejahterakan masyarakat, membangun ketentraman dan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. "Ini lahir (UU Keistimewaan DIY) dari rakyat sehingga Pemda harus mengajak rakyat duduk bareng membangun DIY dengan Undang-



KR-FX Harmianto

Eko Suwanto saat tanya jawab di redaksi Kedaulatan Rakyat.

Undang Keistimewaan DIY," ungkap Eko Suwanto saat berbincang-bincang di redaksi *Harian Kedaulatan Rakyat* (KR), bersama dua Redaktur Pelaksana, Primaswolo Sudjono dan Musahada. Lebih jauh tentang bincang-bincang tersebut dapat di simak di kanal Youtube Kedaulatan Rakyat TV, dengan scan barcode yang tersedia di bawah ini.

Menurut Eko Suwanto, Pemda DIY sejauh ini telah berperan banyak dalam mengimplementasikan UU Keistimewaan DIY tersebut, seperti penataan sejumlah kawasan di sumbu filosofi, Malioboro, Tugu Yogyakarta juga kawasan Pura Pakualam, alokasi danais bidang kebudayaan dan lain-lain. Capaian tersebut membanggakan. Namun demikian, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar Pemda DIY juga melihat tujuan awal dari lahirnya UU Keistimewaan DIY, yakni tercapainya kesejahteraan yang lebih baik. Terkait hal ini, nampaknya Eko Suwanto belum puas. Terutama jika melihat data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak lahirnya UU Keistimewaan DIY, yakni tahun 2012 hingga saat ini tidak terlihat perubahan yang signifikan. Persentase kemiskinan DIY 11,49 persen yang tinggi se-Jawa, persentase pengangguran yang masih disekitaran 4 persen, hingga ketimpangan pengeluaran (gini ratio) yang juga cukup besar. Terhadap data BPS tersebut, politisi muda ini me-

ngatakan baik, tapi sayangnya memang masih belum maksimal," ungkap Eko Suwanto. Eko Suwanto tidak mempersoalkan mengenai metodanya BPS dalam pengambilan data. Karena metoda di Yogyakarta juga diterapkan di provinsi lain, seperti Bali. Sehingga tidaklah terlalu penting membahas soal metoda. Yang jelas

akan lebih merasakan apa yang telah diperjuangkan mereka sebelumnya. Salah satunya, menumbuhkan terus desa atau kalurahan menjadi pusat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemberdayaan masyarakat di pedesaan yang harus bisa dimaksimalkan. Disisi lain, pemberdayaan juga hendaknya menyentuh kalangan generasi muda. Terlebih saat ini gairah anak muda untuk berkembang luar biasa. Misalnya menjadi konten kreator, pembuat game dan lain sebagainya. Terkait hal ini, maka peran pemerintah penting, untuk menggandeng swasta agar keperluan perkembangan anak muda bisa mendapat dukungan. "Pemerintah harus masuk dan kerja keras juga menggandeng swasta," ujarnya. Selanjutnya, kata Eko Suwanto, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya berpihak pada upaya membereskan kemiskinan. Misalnya belanja rapat, diarahkan untuk ke-

rakat miskin, bisa bekerjasama dengan kabupaten/kota, yakni berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembebasan ini, akan membantu warga untuk menabung dan belanja lainnya yang sesuai kebutuhan mereka. Harapan lainnya, kata Eko Suwanto, adalah terus menjadikan desa dan kalurahan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, tiap desa dibantu Dana Istimewa (Danais) minimal Rp 1 miliar pertahun. Bahkan ada desa yang dapat Rp 3,5 miliar. Namun diingatkan Eko Suwanto, pentingnya membangun peringkat desa yang kredibel. Termasuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang diberikan pejabat yang mendapat tugas menjaga kewenangan keistimewaan DIY. "Ini masih jadi tantangan tersendiri bagi kita. Cita-cita UUK DIY," ujarnya.

Ke depan, penegakan hukum harus diikuti edukasi agar ini tak berulang kembali. Komisi A memberikan dukungan penuh Pemda DIY jalan terus menindak penyalahgunaan tanah ini. Tapi di sisi lain harus ada edukasi tentang regulasi pemanfaatan tanah ini, semua transparan dengan baik. Dijelaskan pula, Danais dana milik rakyat Rp 1,4 triliun per tahun, dibanding dana di APBD mungkin tak banyak. Namun demikian, harus dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kebudayaan terus digelar. Hal ini juga sekaligus bisa melawan radikalisme."

Ke depan, kata Eko Suwanto, besar harapan dalam pelaksanaan UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, kesejahteraan rakyat terwujud, turunnya angka kemiskinan, menurunnya ketimpangan ekonomi (gini ratio) dan terjalarnya Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, juga bersama-sama memberantas korupsi. (Fhx/\*)

Propertase Pengangguran di DIY Tahun 2012-2022

Propinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DI Yogyakarta	3,90	3,24	3,37	4,07	2,72	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06

  

Propinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DI Yogyakarta	565,7	541,5	532,6	552,3	494,94	488,53	460,1	448,47	475,72	506,47	457,76

  

Propinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DI Yogyakarta	0,433	0,42	0,432	0,441	0,423	0,432	0,441	0,423	0,434	0,441	0,439

Sumber : BPS DIY



ngungkapkan tiga hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemda DIY, yang semuanya terkait kesejahteraan. Yakni, pengentasan kemiskinan, pengurangan persentase pengangguran dan penurunan ketimpangan. "Pemda harus bekerja keras, karena undang-undang ini dibuat bersama rakyat, karena itu rakyat harus merasakan manfaat dari apa yang diperjuangkan. Benar ada kemajuan di 11 tahun ini, pelayanan publik, desa dan kalurahan dipercaya menyetuh publik de-

hasilnya dibicarakan untuk kemudian ada rekomendasi. "Bicara soal ini (kemiskinan) bukan lah aib. Rekomendasi yang diberikan bukan menjelek-jelekkan, tetapi ngomong fakta untuk selanjutnya dicarikan langkah-langkah untuk mengentas-kannya," ungkap yang ditugaskan kembali oleh partai-nya menjadi calon anggota DPRD DIY periode 2024-2029.

Sejumlah langkah yang disarankan Eko Suwanto dalam upaya menjawab PR tersebut, sehingga rakyat

pentingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Yakni kebutuhan makan, maka dibelanjakan ke penyedia makanan dari UMKM. Demikian juga cinderamata, ya dicari dari UMKM. Menjamu tamu, maka ke kulineran khas Yogya, sehingga akan lebih menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Selain itu, insitusi terkait dengan penyediaan lapangan, hendaknya juga lebih fokus untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Selanjutnya, untuk membantu meringankan masya-



Simak juga wawancara di :  
krjogja.com

